

Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

Amni Umniatussyarifah¹, Asyifa Amani Fatihah², Melya Nur'aeni³

¹, Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

amiumnatussyarifah@gmail.com, amaniisyfa18@gmail.com, nuraenimelya@gmail.com

Keywords:

Keyword 1:

partisipasi masyarakat

Keyword 2:

penanggulangan banjir

Keyword 3: tata

kelola kolaboratif

Keyword 4: mitigasi nonstruktural

Keyword 5:

kebijakan publik

Abstract: *This study aims to analyze community participation in flood mitigation in Dayeuhkolot Subdistrict, Bandung Regency; identify factors that support and hinder community participation; and formulate a pentahelix-based collaborative strategy for flood risk reduction. The study employs a qualitative approach using literature review and descriptive analysis through the examination of various journals, books, reports, and related documents. The research findings indicate that community participation is manifested through mutual aid activities, community service, environmental management, disaster mitigation, and engagement in local communities. Factors supporting participation include social capital, community solidarity, government support, and environmental awareness. Meanwhile, barriers to participation include low awareness among some members of the community, weak coordination, and dependence on external assistance. This study concludes that a pentahelix-based collaborative approach is necessary to create participatory, adaptive, and sustainable flood mitigation in Dayeuhkolot Subdistrict.*

Kata Kunci:

Kata kunci 1 :

community participation

Kata kunci 2 : flood management

Kata kunci 3 :

collaborative governance

Kata kunci 4 : non-

structural mitigation

Kata kunci 5 : public policy

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, serta merumuskan strategi kolaboratif berbasis pentahelix dalam pengurangan risiko banjir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif melalui pengkajian berbagai jurnal, buku, laporan, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, kerja bakti, pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana, dan keterlibatan dalam komunitas lokal. Faktor pendukung partisipasi meliputi modal sosial, solidaritas masyarakat, dukungan pemerintah, dan kesadaran lingkungan. Sementara itu, hambatan partisipasi meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, lemahnya koordinasi, serta ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix diperlukan untuk menciptakan penanggulangan banjir yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan di Kecamatan Dayeuhkolot.*

Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan masyarakat. Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu wilayah yang mengalami banjir secara berulang hampir setiap tahun, terutama ketika curah hujan tinggi melebihi kapasitas sungai dan sistem drainase yang tersedia. Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya kepadatan penduduk, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ke sungai dan saluran drainase, serta kurang optimalnya pengelolaan lingkungan. Akibatnya, pendangkalan sungai dan penyumbatan drainase sering terjadi sehingga menyebabkan luapan air yang menggenangi kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Banjir yang terus berulang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat melalui terganggunya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan munculnya trauma sosial akibat bencana yang terjadi secara terus-menerus (Firman, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana sebenarnya menjadi salah satu pendekatan penting dalam mengurangi risiko banjir. Keterlibatan masyarakat dinilai mampu memperkuat upaya pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana melalui kerja sama dan gotong royong antarmasyarakat. Konsep partisipasi masyarakat menekankan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana (Arnstein, 1969). Selain itu, pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media dipandang mampu menciptakan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya partisipasi masyarakat di Kecamatan Dayeuhkolot masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran lingkungan, minimnya edukasi berkelanjutan, kurangnya sinergi antarpihak, serta lemahnya pemeliharaan infrastruktur drainase dan normalisasi sungai. Kondisi tersebut menyebabkan konsep partisipasi masyarakat yang ideal sering kali belum berjalan secara optimal di lapangan (Pretty, 1995).

Permasalahan banjir di Dayeuhkolot juga dipengaruhi oleh tekanan demografis dan perkembangan wilayah yang cukup pesat. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Dayeuhkolot telah mencapai lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi, jauh di atas rata-rata kepadatan Kabupaten Bandung. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan daya dukung lingkungan semakin menurun, terutama pada kapasitas drainase dan kualitas permukiman. Selain itu, pertumbuhan permukiman dan alih fungsi lahan turut mengurangi daerah resapan air sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir. Kondisi infrastruktur lingkungan yang sebagian besar belum mengalami revitalisasi secara menyeluruh juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Dengan demikian, persoalan banjir di Dayeuhkolot tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola wilayah (Firman, 2009).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat, seperti modal sosial, kesadaran lingkungan, serta sinergi antarpemangku kepentingan dalam pendekatan pentahelix. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat, serta bagaimana strategi kolaboratif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan banjir secara berkelanjutan di Kecamatan Dayeuhkolot.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan banjir serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan kolaboratif berbasis pentahelix yang dapat diterapkan secara nyata dan berkelanjutan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai partisipasi masyarakat, modal sosial, dan penanggulangan bencana berbasis kolaborasi di wilayah

urban dan suburban. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, maupun sektor swasta dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi risiko banjir, serta mendukung pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi model pengembangan partisipasi masyarakat bagi wilayah rawan banjir lainnya di Indonesia.

Tinjauan Literatur

Penelitian ini menggunakan teori *co-production* dalam kebijakan publik sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot. Teori *co-production* menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai pihak yang terdampak atau penerima kebijakan, tetapi sebagai aktor yang terlibat secara aktif dalam produksi bersama kebijakan dan layanan publik dengan pemerintah.

Dalam konteks penanggulangan banjir, partisipasi masyarakat dipahami sebagai kontribusi nyata warga dalam berbagai aktivitas mitigasi nonstruktural, seperti kerja bakti lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, pemantauan kondisi drainase, serta keterlibatan dalam kesiapsiagaan kebencanaan di tingkat lokal. Melalui perspektif *co-production*, keterlibatan tersebut dipandang sebagai bentuk kolaborasi yang memperkuat kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan sekaligus meningkatkan kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko banjir.

Pendekatan ini relevan dengan kondisi di Dayeuhkolot yang menunjukkan bahwa permasalahan banjir bersifat kompleks dan tidak dapat ditangani hanya melalui intervensi teknis dan struktural oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan sosial, partisipasi aktif, dan tindakan kolektif masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori *co-production* memberikan kerangka analisis yang memadai untuk memahami bagaimana interaksi, pembagian peran, dan kontribusi antara pemerintah dan masyarakat berperan dalam mendukung efektivitas kebijakan penanggulangan banjir di wilayah tersebut (Bovaird & Loeffler, 2022; Loeffler & Bovaird, 2020).

Dalam upaya penanggulangan banjir, keberadaan modal sosial berperan dalam memperkuat keterlibatan masyarakat, khususnya pada pelaksanaan kegiatan mitigasi, pemeliharaan sarana lingkungan, serta pembentukan respons bersama ketika bencana terjadi. Perspektif ini melengkapi kerangka partisipasi Cohen dan Uphoff dengan memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor sosial yang memengaruhi konsistensi dan kualitas partisipasi masyarakat. Dengan demikian, analisis partisipasi masyarakat tidak hanya diarahkan pada tahapan keterlibatan, tetapi juga pada kondisi sosial yang memungkinkan partisipasi tersebut berkembang dan berfungsi secara efektif pada tingkat lokal seperti Kecamatan Dayeuhkolot (Adi, 2013; Mardikanto & Soebiato, 2015)

Kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir telah banyak dilakukan dalam perspektif administrasi publik dan kebijakan bencana, dengan temuan yang relatif konsisten bahwa keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan program mitigasi. Penelitian (Irawan et al., 2023) dalam Jurnal Praxis menunjukkan bahwa program penanggulangan banjir yang melibatkan masyarakat secara aktif pada tahap perencanaan dan pelaksanaan cenderung lebih adaptif terhadap kondisi lokal dibandingkan program yang bersifat top-down. Temuan serupa dikemukakan oleh (Nugroho & Winarno, 2021) yang menegaskan bahwa rendahnya kualitas partisipasi publik menyebabkan masyarakat hanya berperan sebagai penerima kebijakan, sehingga program pengendalian banjir tidak mampu membangun rasa kepemilikan (sense of ownership) di tingkat komunitas.

Selain itu, (Lestari et al., 2020) dalam studinya di wilayah DAS Citarum menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih didominasi oleh aktivitas pascabencana, sementara keterlibatan dalam tahap mitigasi dan kesiapsiagaan relatif rendah akibat keterbatasan akses informasi dan minimnya ruang partisipasi yang disediakan pemerintah. Penelitian (Handayani & Suryani, 2019) juga mengidentifikasi bahwa faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada skala wilayah yang luas dan belum secara spesifik mengkaji karakteristik partisipasi masyarakat pada wilayah dengan intensitas

banjir tinggi dan kepadatan permukiman ekstrem seperti Kecamatan Dayeuhkolot, sehingga temuan empiris terkait bentuk dan kualitas partisipasi masyarakat pada level kecamatan masih terbatas.

Berdasarkan pemetaan terhadap persoalan empiris dan temuan penelitian sebelumnya, dapat dilihat adanya celah penelitian yang masih belum terjawab secara memadai. Walaupun sejumlah kajian telah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam penanggulangan banjir, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan partisipasi pada tataran konseptual dan normatif, tanpa menggali secara rinci kualitas serta bentuk keterlibatan masyarakat pada setiap tahap penanganan banjir.

Selain itu, fokus penelitian umumnya diarahkan pada wilayah berskala makro, seperti daerah aliran sungai atau tingkat kabupaten, sehingga dinamika partisipasi masyarakat pada level kecamatan sebagai aktor terdepan dalam pengelolaan risiko banjir belum terungkap secara utuh. Sebagian kajian juga cenderung menitikberatkan pada peran pemerintah dan capaian kebijakan, sementara partisipasi masyarakat diperlakukan sebagai faktor pelengkap, bukan sebagai fokus utama analisis. Padahal, kondisi empiris menunjukkan bahwa wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, tekanan lingkungan yang besar, serta keterbatasan infrastruktur seperti Kecamatan Dayeuhkolot membutuhkan kajian partisipasi masyarakat yang lebih kontekstual dan mendalam.

Dengan demikian, masih terdapat kekosongan penelitian yang mengkaji partisipasi masyarakat secara komprehensif dengan menelusuri keterlibatan warga pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program, serta mengaitkannya dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai fokus analitis utama dalam penanggulangan banjir di tingkat lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif. Metode studi literatur merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis literatur atau sumber informasi yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Metode ini melibatkan penelusuran

beragam sumber literatur, seperti buku, artikel, laporan dan lain- lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik yang sedang diteliti (Ujang et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif karena pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, khususnya di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Partisipasi masyarakat itu tidak hanya dilihat dari aspek kuantitatif, tetapi juga perlu dipahami dari sisi perilaku, persepsi, serta keterlibatan warga dalam menghadapi bencana.

Sementara metode studi literatur digunakan untuk mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan. Penelitian dan dokumen kebijakan yang relevan guna memperoleh landasan teoritis yang kuat serta pemahaman yang komprehensif terhadap topik penelitian. Tahapan studi literatur pada penelitian ini yaitu pengumpulan data dengan identifikasi masalah. Selanjutnya dilakukan penyaringan data yang akan digunakan berkaitan dengan penelitian. Kemudian artikel yang sudah dilakukan penyaringan di analisis untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung terkait penelitian (Ujang et al., 2023).

Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat Dayeuhkolot dalam Penanggulangan Banjir

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas mitigasi bencana. Kondisi geografis Dayeuhkolot yang berada di wilayah cekungan dan dilalui Sungai Citarum menyebabkan wilayah ini rentan mengalami banjir setiap musim hujan. Dalam situasi tersebut, keterlibatan masyarakat tidak hanya dibutuhkan pada saat tanggap darurat, tetapi juga pada tahap pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayeuhkolot mulai terlibat dalam berbagai kegiatan mitigasi seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, kegiatan reboisasi, pelatihan kebencanaan, hingga partisipasi dalam forum komunikasi masyarakat siaga bencana.

Dalam penelitian (Wulan et al., 2022) bentuk komunikasi masyarakat telah menjadi budaya lokal yang diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti rapat warga, pengajian, kerja bakti, PKK, dan posyandu sebagai media internalisasi mitigasi bencana banjir. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi banjir. Selain itu, penelitian (Heryanti et al., 2025) juga menjelaskan bahwa solidaritas dan kerja sama antarwarga meningkat pascabencana melalui partisipasi dalam penyuluhan, pelatihan kebencanaan, dan aksi gotong royong. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan ketahanan sosial terhadap ancaman banjir di Dayeuhkolot.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kegiatan mitigasi non struktural yang dilakukan bersama pemerintah dan berbagai lembaga kebencanaan. Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot bersama BPBD, TAGANA, dan Satgas Citarum Harum melibatkan masyarakat dalam penentuan jalur evakuasi, titik kumpul, serta simulasi kebencanaan. (Wulan et al., 2022) menyebutkan bahwa penentuan jalur evakuasi dan titik pengungsian harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar proses evakuasi berjalan efektif dan masyarakat memahami fungsi jalur evakuasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi di sekitar lingkungan permukiman sebagai upaya pengendalian lingkungan untuk mengurangi risiko banjir. Partisipasi tersebut memperlihatkan adanya kesadaran kolektif bahwa penanggulangan banjir tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif warga. Dalam penelitian (Muhammad & Aziz, 2020), dijelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengurangi banjir melalui penghijauan, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan komunitas lokal dalam upaya mitigasi banjir secara berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik dan kebencanaan, partisipasi masyarakat Dayeuhkolot menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan banjir sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga sebagai aktor utama di tingkat lokal. Masyarakat

tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang memiliki peran penting dalam proses mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. (Wulan et al., 2022) menegaskan bahwa mitigasi non struktural melalui perubahan perilaku masyarakat lebih efektif dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan mitigasi struktural semata.

Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat perlu diarahkan melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas, penguatan modal sosial, dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperkuat forum kebencanaan lokal agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta terlibat dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan banjir. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penanggulangan banjir di Dayeuhkolot dapat dilakukan secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang memperkuat keterlibatan warga dalam menghadapi risiko bencana. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan dukungan pemerintah, tetapi juga berasal dari kekuatan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat seperti gotong royong, solidaritas sosial, jaringan komunitas, rasa saling percaya, hingga meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Dalam konteks wilayah rawan banjir seperti Dayeuhkolot, faktor-faktor sosial tersebut menjadi modal penting karena masyarakat menghadapi ancaman banjir hampir setiap tahun. Kondisi banjir yang berulang membuat masyarakat membangun pola adaptasi sosial melalui kerja sama dan keterlibatan kolektif dalam menghadapi bencana (Handayani & Suryani, 2019).

Tabel 1. Kondisi Demografis dan Kerawanan Banjir Kecamatan Dayeuhkolot

Indikator	Data
-----------	------

Jumlah penduduk Dayeuhkolot (2023)	117.000 jiwa
Kepadatan penduduk	>8.000 jiwa/km ²
Frekuensi banjir	Hampir setiap tahun
Tinggi genangan banjir	30–100 cm
Durasi genangan	1–5 hari
Kawasan terdampak utama	Permukiman padat dan kawasan usaha warga

Sumber: (BPS Kabupaten Bandung, 2023); (BPBD Kabupaten Bandung, 2023).

Dari tabel di atas bisa di lihat bahwasannya kondisi kerawanan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dapat dilihat dari tingginya kepadatan penduduk serta frekuensi kejadian banjir yang terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot mencapai sekitar 117.000 jiwa dengan tingkat kepadatan lebih dari 8.000 jiwa per kilometer persegi. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bandung. Tingginya kepadatan penduduk menyebabkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan semakin besar, terutama pada kapasitas drainase dan kondisi permukiman. Selain itu, laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2023 menunjukkan bahwa banjir di Dayeuhkolot terjadi hampir setiap tahun dengan tinggi genangan mencapai 30–100 sentimeter dan durasi genangan antara satu hingga lima hari. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat hidup dalam situasi kerentanan bencana yang tinggi sehingga membutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penanggulangan banjir (Bandung, 2023).

Salah satu faktor utama yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir adalah modal sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Modal sosial tercermin melalui budaya gotong royong, hubungan sosial antarwarga, serta rasa kebersamaan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat Dayeuhkolot. Ketika

banjir terjadi, masyarakat cenderung bergerak secara kolektif untuk membantu warga terdampak, membersihkan lingkungan, serta melakukan evakuasi secara mandiri sebelum bantuan pemerintah datang. Budaya gotong royong tersebut menjadi kekuatan sosial yang memungkinkan masyarakat tetap mampu bertahan menghadapi kondisi banjir yang terus berulang. Menurut putnam modal sosial berupa kepercayaan sosial, norma bersama, dan jaringan sosial mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan tindakan kolektif untuk menyelesaikan persoalan public (Putnam, 1993).

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

Bentuk Partisipasi	Bentuk Kegiatan
Kerja bakti lingkungan	Membersihkan drainase dan sampah
Ronda banjir	Pemantauan debit air sungai
Evakuasi warga	Membantu masyarakat terdampak
Bantuan logistik	Pengumpulan makanan dan kebutuhan warga
Sosialisasi lingkungan	Edukasi kebersihan sungai dan drainase
Pemantauan lingkungan	Pengawasan saluran air oleh warga

Sumber: (Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot, 2023); (BPBD Kabupaten Bandung, 2023).

Dari tabel di atas di Kecamatan Dayeuhkolot, budaya gotong royong terlihat melalui berbagai kegiatan masyarakat seperti kerja bakti membersihkan saluran drainase, ronda banjir, hingga kegiatan pembersihan lingkungan pascabanjir. Kegiatan tersebut umumnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan melibatkan unsur RT, RW, karang taruna, serta komunitas lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya muncul karena adanya program pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap ancaman banjir yang mereka alami secara langsung setiap tahun.

Selain gotong royong, solidaritas sosial masyarakat juga menjadi faktor penting yang mendukung keterlibatan warga dalam penanggulangan banjir. Solidaritas sosial berkembang karena masyarakat memiliki pengalaman yang sama dalam menghadapi banjir secara berulang. Pengalaman tersebut menciptakan rasa senasib di antara warga sehingga mendorong munculnya kepedulian sosial yang tinggi. Ketika banjir terjadi, masyarakat secara spontan membantu tetangga yang terdampak, menyediakan tempat pengungsian sementara, hingga membantu proses evakuasi kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Solidaritas tersebut menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat yang lahir dari hubungan sosial yang kuat di tingkat lingkungan.

Penelitian (Lestari et al., 2020) mengenai mitigasi banjir berbasis masyarakat di DAS Citarum menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan banjir pada tingkat lokal. Solidaritas memungkinkan masyarakat bergerak lebih cepat dalam merespons bencana dibandingkan bantuan formal pemerintah yang sering kali membutuhkan proses koordinasi birokrasi. Dalam konteks Dayeuhkolot, solidaritas sosial terlihat melalui keterlibatan warga dalam kegiatan ronda malam saat musim hujan, pengumpulan bantuan bagi korban banjir, hingga pembentukan kelompok relawan lokal yang membantu masyarakat ketika banjir terjadi.

Faktor pendukung lainnya adalah keberadaan jaringan komunitas lokal yang aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Komunitas tersebut meliputi kelompok karang taruna, komunitas peduli sungai, organisasi pemuda, hingga relawan kebencanaan. Keberadaan komunitas lokal mempermudah proses koordinasi dan mobilisasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan banjir. Melalui komunitas tersebut, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai kondisi banjir, jadwal kerja bakti, hingga edukasi tentang pengelolaan lingkungan.

Menurut (Nugroho & Winarno, 2021) partisipasi masyarakat akan berkembang lebih baik apabila masyarakat memiliki ruang kolektif yang mampu mempertemukan kepentingan bersama dalam menyelesaikan persoalan publik. Dalam konteks

Dayeuhkolot, komunitas lokal menjadi sarana yang memperkuat hubungan sosial masyarakat sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Melalui jaringan komunitas tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai korban banjir, tetapi juga menjadi aktor penting dalam proses mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

Selain faktor sosial, rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah juga menjadi faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat penting karena memengaruhi kesediaan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai program mitigasi bencana yang dilaksanakan pemerintah daerah. Apabila masyarakat percaya bahwa program pemerintah memberikan manfaat nyata, maka masyarakat akan lebih mudah terlibat dalam kegiatan seperti normalisasi sungai, program kebersihan lingkungan, maupun sosialisasi mitigasi bencana.

Penelitian yang dilakukan (Handayani & Suryani, 2019) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Di Dayeuhkolot, hubungan sosial yang relatif dekat antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting dalam membangun kerja sama penanggulangan banjir. Hubungan tersebut mempermudah koordinasi ketika banjir terjadi serta mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat.

Tabel 3. Dukungan Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir

Bentuk Dukungan Pemerintah	Implementasi
Sosialisasi mitigasi banjir	Dilaksanakan melalui desa dan kecamatan
Bantuan logistik	Distribusi saat banjir dan pascabanjir

Penyediaan alat evakuasi	Perahu karet dan perlengkapan darurat
Koordinasi relawan	Bersama RT/RW dan komunitas lokal
Program kebersihan lingkungan	Dilaksanakan secara berkala
Edukasi pengelolaan sampah	Melibatkan masyarakat dan sekolah

Sumber: (BPBD Kabupaten Bandung, 2023); (Pemerintah Kecamatan Dayeuhkolot, 2023).

Dari tabel di atas dukungan pemerintah daerah juga menjadi faktor yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui BPBD dan pemerintah kecamatan secara rutin melakukan sosialisasi mitigasi bencana, penyediaan bantuan logistik, hingga koordinasi penanganan banjir bersama masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan berupa alat evakuasi dan mendukung kegiatan kebersihan lingkungan yang dilakukan masyarakat.

Faktor lain yang mendukung partisipasi masyarakat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kesadaran tersebut muncul karena masyarakat merasakan langsung dampak banjir terhadap kehidupan sehari-hari, seperti kerusakan rumah, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi. Pengalaman tersebut mendorong masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan.

Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup BPS tahun 2022, sekitar 20–25 persen rumah tangga di wilayah perkotaan Kabupaten Bandung masih melakukan pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan. Namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2023 mencatat bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan mengalami peningkatan, khususnya pada wilayah rawan banjir seperti Dayeuhkolot (Statistik, 2022).

Tabel 4. Kondisi Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat

Indikator Lingkungan	Data
Rumah tangga membuang sampah sembarangan	±20–25%
Drainase lama belum direvitalisasi	>60%
Intensitas kerja bakti lingkungan	Meningkat saat musim hujan
Keterlibatan komunitas lingkungan	Aktif di wilayah rawan banjir
Sosialisasi kebersihan sungai	Dilakukan rutin oleh pemerintah

Sumber: (BPS, 2022); (DLH Kabupaten Bandung, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dipengaruhi oleh kombinasi faktor sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas masyarakat menjadi kekuatan utama yang memungkinkan masyarakat mampu menghadapi banjir secara kolektif. Selain itu, dukungan pemerintah, keberadaan komunitas lokal, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan turut memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan penanggulangan banjir. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, masyarakat Dayeuhkolot tidak hanya menjadi objek terdampak bencana, tetapi juga menjadi subjek penting dalam membangun ketahanan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot

Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot pada dasarnya telah terbentuk melalui berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan keterlibatan masyarakat belum berjalan secara optimal. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai, mendirikan bangunan di bantaran sungai, serta kurang memperhatikan sistem drainase lingkungan.

Kondisi tersebut memperburuk potensi banjir yang terjadi hampir setiap musim hujan. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dan kepadatan permukiman yang tidak sejalan dengan daya dukung lingkungan menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kabupaten Bandung, termasuk Kecamatan Dayeuhkolot. Selain itu, masyarakat cenderung menganggap banjir sebagai kejadian rutin sehingga kesadaran preventif terhadap risiko bencana mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan partisipasi masyarakat tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh pola pikir dan budaya masyarakat yang telah lama beradaptasi dengan banjir.

Hambatan lainnya terlihat dari menurunnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat pascabencana. Sebelum banjir terjadi secara rutin, masyarakat memiliki tingkat kebersamaan yang cukup tinggi dalam menjaga lingkungan dan membersihkan saluran air. Namun setelah banjir terus berulang, kegiatan gotong royong mulai berkurang karena masyarakat lebih mengandalkan bantuan pemerintah dan lembaga luar. Penelitian (Muhamad et al., 2017) menjelaskan bahwa kegiatan membersihkan sisa banjir yang sebelumnya dilakukan bersama-sama kini lebih sering dilakukan secara individu.

Selain itu, muncul anggapan bahwa menjaga kebersihan sungai bukan lagi tanggung jawab masyarakat sepenuhnya karena pemerintah telah melakukan normalisasi sungai secara rutin. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan preventif banjir mulai mengalami penurunan. Dalam tabel perubahan modal sosial juga dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan preventif banjir dan pembangunan lingkungan mulai berkurang akibat meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan pihak luar. Penurunan solidaritas sosial ini menjadi hambatan serius karena keberhasilan mitigasi bencana sangat membutuhkan kerja sama dan partisipasi aktif masyarakat.

Hambatan partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Informasi mengenai mitigasi bencana, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan banjir belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh warga. (Muhammad & Aziz, 2020) menjelaskan bahwa komunikasi penanganan

banjir sebenarnya telah berjalan, tetapi masih terdapat ketidaksinkronan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga pelaksanaan mitigasi belum optimal. Selain itu, sebagian masyarakat masih kurang memahami cara kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir akibat minimnya edukasi dan pelatihan kebencanaan. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas kebencanaan, dan jumlah relawan tanggap bencana juga menjadi kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering kali hanya terlibat ketika banjir sudah terjadi, sementara keterlibatan dalam tahap pencegahan dan mitigasi masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain faktor sosial dan komunikasi, hambatan partisipasi masyarakat di Dayeuhkolot juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan ketergantungan masyarakat terhadap wilayah tempat tinggalnya. Banyak masyarakat tetap memilih tinggal di kawasan rawan banjir karena faktor pekerjaan, kedekatan sosial, dan keterikatan terhadap tanah kelahiran. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat enggan direlokasi karena khawatir kehidupan sosial ekonomi mereka terganggu apabila pindah ke tempat lain. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih beradaptasi dengan banjir dibandingkan meninggalkan wilayahnya.

Di sisi lain, kehadiran bantuan dari pemerintah maupun LSM secara terus-menerus juga menimbulkan ketergantungan sosial pada sebagian masyarakat. (Muhamad et al., 2017) menjelaskan bahwa bantuan dari pihak luar di satu sisi membantu korban banjir, tetapi di sisi lain mendorong munculnya sikap ketidakpedulian dan ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian agar partisipasi masyarakat tidak hanya muncul saat tanggap darurat, tetapi juga berkembang dalam bentuk kesiapsiagaan, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Strategi Kebijakan Kolaboratif Berbasis Pentahelix dalam Penanggulangan Banjir

Strategi penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui model pentahelix. Pendekatan

ini menjadi relevan karena banjir di Dayeuhkolot merupakan persoalan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan cekungan Sungai Citarum, buruknya sistem drainase, tingginya alih fungsi lahan, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan banjir tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dipandang mampu menciptakan sistem penanggulangan banjir yang lebih efektif, partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Konsep pentahelix sendiri merupakan bentuk pengembangan dari model kolaborasi sebelumnya yang menempatkan lima aktor utama sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pendekatan ini, setiap unsur memiliki fungsi, peran, dan kontribusi yang saling melengkapi sehingga tercipta tata kelola kolaboratif yang lebih kuat. Kajian mengenai kolaborasi pentahelix menjelaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada adanya kesadaran kolektif, kesetaraan fungsi, serta kemampuan antaraktor dalam berbagi sumber daya dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien melalui kerangka kebijakan, mekanisme koordinasi, serta program yang terintegrasi (Pujiono, 2022).

Pemerintah memiliki posisi sentral dalam strategi kolaboratif ini karena berperan sebagai regulator, koordinator, sekaligus pengambil kebijakan dalam penanggulangan banjir. Pemerintah daerah melalui BPBD dan dinas terkait bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan pengurangan risiko banjir, membangun infrastruktur pengendali banjir, serta mengoordinasikan seluruh pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Berbagai upaya seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi sungai, rumah pompa, dan peningkatan kapasitas drainase telah dilakukan sebagai bentuk mitigasi struktural untuk mengurangi dampak banjir di Dayeuhkolot (Ba. Akan tetapi,

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama lemahnya koordinasi antarinstansi dan belum optimalnya komunikasi lintas sektor. Dalam praktiknya, mekanisme kolaborasi yang terjalin masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur pentahelix secara aktif. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dijalankan sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat tata kelola kolaboratif melalui sistem koordinasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan terintegrasi antar lembaga (Pujiono, 2022).

Selain pemerintah, akademisi memiliki kontribusi penting dalam mendukung strategi penanggulangan banjir berbasis pentahelix. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan sebagai penyedia pengetahuan, data ilmiah, dan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Penelitian mengenai kondisi lingkungan, pola curah hujan, sistem drainase, tata ruang wilayah, hingga perilaku masyarakat terhadap lingkungan menjadi sangat penting dalam mendukung kebijakan pengurangan risiko banjir yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah yang rendah, pendangkalan sungai, buruknya drainase, serta kepadatan permukiman di sekitar daerah aliran sungai (Heryanti et al., 2025). Akademisi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kegiatan edukasi, sosialisasi mitigasi bencana, pelatihan kesiapsiagaan, serta pengembangan inovasi teknologi yang mendukung penanggulangan banjir. Dalam pendekatan pentahelix, akademisi diposisikan sebagai konseptor yang membantu menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi jangka panjang (Pujiono, 2022).

Keterlibatan dunia usaha juga menjadi bagian penting dalam strategi kolaboratif penanggulangan banjir. Sektor swasta dapat memberikan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga bantuan logistik ketika terjadi bencana. Dalam banyak kasus,

keterlibatan dunia usaha mampu membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya yang terbatas, terutama pada tahap tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Selain itu, sektor swasta juga dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan tahan terhadap risiko bencana. Dukungan tersebut menjadi penting mengingat penanggulangan banjir membutuhkan biaya yang besar dan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha perlu diperkuat agar pelaksanaan program pengurangan risiko banjir dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan strategi penanggulangan banjir berbasis pentahelix. Partisipasi masyarakat tidak hanya dibutuhkan saat terjadi bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan dan mitigasi. Bentuk keterlibatan masyarakat dapat berupa kerja bakti membersihkan saluran air, pengelolaan sampah rumah tangga, penghijauan lingkungan, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Akan tetapi, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengurangan risiko banjir di Dayeuhkolot. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan saluran drainase masih sering ditemukan sehingga memperparah kondisi banjir ketika curah hujan tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang panjang dan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir.

Media massa dan media sosial turut memiliki peran strategis dalam memperkuat kolaborasi pentahelix dalam penanggulangan banjir. Media berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi publik, dan komunikasi kebencanaan kepada masyarakat secara luas. Informasi mengenai peringatan dini banjir, kondisi cuaca, langkah mitigasi, hingga kebijakan pemerintah dapat disampaikan dengan cepat melalui media sehingga masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana. Selain itu, media juga dapat

membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan memperkuat budaya mitigasi bencana di tengah masyarakat. Dalam pendekatan pentahelix, media diposisikan sebagai aktor yang mendukung literasi kebencanaan sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (Pujiono, 2022).

Melalui sinergi yang kuat antaraktor dalam model pentahelix, strategi penanggulangan banjir di Dayeuhkolot diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media akan memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko banjir sekaligus menciptakan tata kelola kebencanaan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan komitmen bersama dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, pendekatan pentahelix tidak hanya menjadi model kerja sama lintas sektor, tetapi juga menjadi strategi kebijakan yang mampu menciptakan sistem penanggulangan banjir yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Dayeuhkolot.

Model Partisipasi Masyarakat Dayeuhkolot sebagai Replikasi bagi Wilayah Rawan Banjir

Permasalahan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot menunjukkan bahwa penanggulangan bencana tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian penting dalam sistem mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan hasil penelitian, banjir di wilayah Dayeuhkolot dipengaruhi oleh kombinasi faktor alam, teknis, dan sosial yang saling berkaitan sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan (Heryanti et al., 2025). Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan terdampak sekaligus kelompok pertama yang merasakan dampak banjir secara langsung.

Model partisipasi masyarakat yang berkembang di Dayeuhkolot memperlihatkan adanya upaya kolektif masyarakat dalam menghadapi ancaman banjir melalui kegiatan sosial, pengelolaan lingkungan, serta keterlibatan dalam aktivitas mitigasi bencana. Bentuk partisipasi masyarakat terlihat dari kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, pengelolaan sampah berbasis iuran warga, pelaporan kerusakan drainase kepada pemerintah, hingga keterlibatan masyarakat dalam program kebencanaan dan lingkungan seperti "Citarum Harum." Meskipun dalam praktiknya tingkat partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata, keberadaan solidaritas sosial dan budaya gotong royong menjadi modal sosial yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana banjir (Muhamad et al., 2017).

Karakteristik utama model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot dapat dilihat dari pendekatan berbasis komunitas (community-based approach) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam pengurangan risiko bencana. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan pascabencana, tetapi juga dilibatkan dalam proses pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan lingkungan setelah banjir terjadi. Pendekatan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari penanggulangan bencana yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, mengidentifikasi permasalahan lingkungan, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penanganan banjir di wilayahnya.

Selain berbasis komunitas, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot juga memiliki karakter kolaboratif. Penanganan banjir dilakukan melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, BPBD, komunitas lingkungan, serta pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pengurangan risiko bencana. Bentuk kolaborasi ini terlihat dari adanya penyuluhan kebencanaan, program edukasi lingkungan, kegiatan sosial masyarakat, dan pembangunan infrastruktur pendukung mitigasi banjir yang melibatkan warga setempat. Menurut (Wati et al., 2025) collaborative governance dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa kolaborasi lintas

sektor mampu meningkatkan efektivitas penanganan bencana meskipun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam koordinasi dan partisipasi publik.

Model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot juga memperlihatkan pentingnya modal sosial sebagai fondasi utama dalam membangun ketahanan wilayah. Modal sosial tersebut tercermin melalui kepercayaan antarwarga, solidaritas sosial, jaringan komunitas, serta budaya gotong royong yang masih terjaga di tengah masyarakat. Ketika banjir terjadi, masyarakat cenderung saling membantu dalam proses evakuasi, distribusi bantuan, penyediaan tempat pengungsian, hingga pembersihan lingkungan pascabencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak banjir. Dalam perspektif mitigasi bencana, modal sosial menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap ancaman bencana di masa depan.

Di sisi lain, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot juga memperlihatkan bahwa pengurangan risiko banjir memerlukan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau saluran air sehingga memperburuk kondisi drainase dan meningkatkan potensi banjir. Namun demikian, adanya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kegiatan kerja bakti lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, edukasi lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi budaya kolektif dalam menjaga lingkungan.

Dalam konteks replikasi, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai wilayah rawan banjir lainnya di Indonesia, khususnya daerah perkotaan padat penduduk, kawasan bantaran sungai, dan wilayah cekungan yang memiliki karakteristik serupa. Replikasi model dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok masyarakat siaga bencana, penguatan komunitas peduli lingkungan, pelatihan mitigasi bencana berbasis masyarakat, serta peningkatan

partisipasi warga dalam pengelolaan infrastruktur lingkungan seperti drainase dan pengelolaan sampah. Pendekatan ini penting karena penanganan banjir tidak hanya membutuhkan intervensi teknis dari pemerintah, tetapi juga dukungan sosial dari masyarakat sebagai pelaku utama di tingkat lokal.

Selain itu, replikasi model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang responsif dan inklusif. Pemerintah daerah harus mampu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat melalui forum diskusi, musyawarah lingkungan, maupun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh warga. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan responsivitas terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang dilaporkan masyarakat agar kepercayaan publik dapat terbangun dengan baik. Dalam hal ini, keberhasilan model partisipatif sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun hubungan yang sinergis dengan masyarakat.

Model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot juga memberikan kontribusi penting terhadap pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pemantauan kondisi drainase, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir dapat membantu mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pemerintah karena masyarakat ikut terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan program mitigasi bencana. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan ketahanan wilayah terhadap banjir (Permana et al., 2023).

Kontribusi model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot juga dapat dilihat dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Model ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan. SDGs 11 menekankan pentingnya menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai ancaman, termasuk bencana banjir. Melalui penguatan partisipasi masyarakat, pengelolaan lingkungan berbasis

komunitas, dan peningkatan kapasitas sosial masyarakat, model Dayeuhkolot dapat menjadi contoh praktik lokal dalam mendukung pembangunan kota yang lebih tangguh terhadap bencana.

Selain mendukung SDGs 11, model ini juga berkaitan erat dengan SDGs 13 tentang penanganan perubahan iklim (climate action). Banjir merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologi yang intensitasnya semakin meningkat akibat perubahan iklim global. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana menjadi langkah strategis dalam mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengurangi pencemaran sungai, serta mendukung pengelolaan tata ruang yang lebih baik merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan iklim di tingkat lokal.

Lebih jauh lagi, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan wilayah tidak hanya bergantung pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada kapasitas sosial masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif, solidaritas sosial yang kuat, dan keterlibatan aktif dalam menjaga lingkungan, maka kemampuan wilayah dalam menghadapi bencana akan semakin meningkat. Sebaliknya, lemahnya partisipasi masyarakat dapat memperbesar tingkat kerentanan wilayah terhadap risiko banjir. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan wilayah harus dilakukan secara integratif dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, teknis, dan kelembagaan secara bersamaan.

Secara keseluruhan, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot memperlihatkan bahwa pengurangan risiko banjir memerlukan pendekatan kolaboratif berbasis komunitas yang melibatkan berbagai aktor secara aktif dan berkelanjutan. Keberhasilan penanganan banjir tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga oleh tingkat kesadaran masyarakat, kekuatan modal sosial, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta kualitas kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, model partisipasi masyarakat Dayeuhkolot dapat dijadikan sebagai salah satu contoh praktik baik (best practice) dalam pengelolaan risiko

banjir berbasis masyarakat yang dapat direplikasi di berbagai wilayah rawan banjir di Indonesia guna menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot telah berlangsung dalam berbagai bentuk, terutama melalui kegiatan gotong royong, pengelolaan lingkungan, dan keterlibatan dalam aktivitas kebencanaan di tingkat lokal. Temuan ini sejalan dengan kerangka partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan program, meskipun keterlibatan pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi masih terbatas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung bersifat operasional dan belum sepenuhnya strategis.

Partisipasi yang berkembang di Dayeuhkolot juga dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial masyarakat, khususnya solidaritas sosial dan budaya gotong royong. Temuan ini mendukung pandangan Putnam yang menekankan peran kepercayaan sosial dan jaringan komunitas dalam mendorong tindakan kolektif. Dalam konteks banjir yang terjadi hampir setiap tahun, pengalaman bersama menghadapi bencana memperkuat kohesi sosial masyarakat dan mendorong keterlibatan warga dalam kegiatan mitigasi nonstruktural.

Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan yang membatasi kualitas partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pengelolaan lingkungan, ketergantungan pada bantuan eksternal, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang menghambat partisipasi berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sering kali bersifat reaktif dan meningkat saat bencana terjadi, tetapi melemah pada fase pencegahan dan kesiapsiagaan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa penanggulangan banjir membutuhkan pendekatan kolaboratif yang lebih terstruktur melalui model pentahelix. Keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media perlu

diarahkan pada pembagian peran yang jelas serta mekanisme koordinasi yang konsisten. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi literatur sehingga belum menggambarkan dinamika partisipasi masyarakat secara langsung di lapangan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara atau observasi untuk menggali kualitas partisipasi masyarakat secara lebih mendalam, khususnya pada tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Kesimpulan

Partisipasi masyarakat memiliki peran strategis dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, terutama melalui aktivitas mitigasi nonstruktural berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pemeliharaan lingkungan, dan respons kebencanaan menunjukkan adanya kapasitas sosial yang berkontribusi terhadap pengurangan dampak banjir serta penguatan ketahanan masyarakat di tingkat lokal. Praktik partisipasi tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi risiko banjir yang terjadi secara berulang. Bentuk partisipasi yang berkembang masih cenderung bersifat operasional dan terfokus pada tahap pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi penanggulangan banjir belum terbangun secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola kebencanaan, sehingga ruang bagi masyarakat untuk berperan secara strategis masih terbatas.

Keterbatasan kualitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian warga terhadap pengelolaan lingkungan, keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, serta belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antaraktor. Ketergantungan terhadap intervensi pemerintah dan bantuan eksternal juga masih menjadi pola dominan, yang berimplikasi pada lemahnya kemandirian masyarakat dalam penanggulangan banjir secara berkelanjutan.

Upaya penanggulangan banjir memerlukan penguatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya secara terintegrasi. Penguatan partisipasi masyarakat perlu diarahkan tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan ruang partisipasi yang inklusif melalui mekanisme koordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan edukasi dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat.

Secara praktis, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan penanggulangan banjir yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Integrasi partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penanggulangan banjir diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan, keberlanjutan program, serta ketahanan wilayah terhadap risiko bencana di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Adi, I. R. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sosial*. Rajawali Pers.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bandung, B. P. S. K. (2023). *Kabupaten Bandung dalam Angka 2023*. BPS Kabupaten Bandung.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. B. T.-H. on T. of G. (2022). *Co-production: theoretical roots and conceptual frameworks* (C. Ansell & J. Torfing (eds.)). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800371972.00049>
- Firman, T. (2009). *Pengelolaan Banjir di Perkotaan: Pendekatan Non-Struktural di Wilayah Bandung*. Institut Teknologi Bandung.
- Handayani, T., & Suryani, N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 101–115.
- Heryanti, A. S., Supryatna, K. S. N., Rahayu, Y., Andi, M., & Septiadi. (2025). Analisis potensi faktor penyebab banjir di kecamatan dayeuhkolot kabupaten bandung. *Journal Geological Processes, Risks and Integrated Spatial Modeling*, 03(01), 63–74.
- Irawan, D. N., Pratama, A., & Suryadi, R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Praxis*, 7(2), 145–160.
- Lestari, D., Rahmawati, S., & Hidayat, E. (2020). Mitigasi Banjir Berbasis Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Citarum. *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 4(1), 55–69.
- Loeffler, E., & Bovaird, T. (2020). *The Palgrave Handbook of Co-Production of Public*

- Services and Outcomes*. Palgrave Macmillan Ltd. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Muhamad, R. A. T., Sekarningrum, B., & Yusar. (2017). MODAL SOSIAL DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR (Kasus di Kabupaten Bandung , Jawa Barat) Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadjaran . Prodi Sosiologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Padjadja. *Sosioglobal Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 101–114.
- Muhammad, F. I., & Aziz, Y. M. A. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI DESA DAYEUKHOKLOT. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1973), 50–60.
- Nugroho, R., & Winarno, B. (2021). Partisipasi Publik dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25–40.
- Permana, D., Jenderal, U., & Yani, A. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menanggulangi risiko bencana banjir di kabupaten bandung. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165.
- Pretty, J. N. (1995). *Participatory Learning and Action: A Trainer's Guide*. International Institute for Environment and Development.
- Pujiono. (2022). *Laporan Akhir: Kajian Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengelolaan Risiko Bencana Di Indonesia*. Pujiono Center.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Statistik, B. P. (2022). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022*. BPS RI.
- Ujang, J., Adya, P. R., & Sarni, S. (2023). IMPLEMENTASI MODEL PROBLEM BASED LEARNING PADA PEMBELAJARAN IPA UNTUK MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA. *Urnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09, 3247–3256.
- Wati, U. S., Fauzi, L. M., Kushartono, T., Jenderal, U., & Yani, A. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KOTA BANDUNG. *Jurnal*

Praxis Idealis Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, 02(01), 144–146.

Wulan, Y. R., Mulyadi, D., & Nurliawati, N. (2022). Jurnal Media Administrasi Terapan
MODEL MITIGASI NON STRUKTURAL BENCANA BANJIR Non Structural Flood
Mitigation Model In Dayeuhkolot District , Bandung. *Jurnal Media Administrasi
Terapan*, 03(1), 90–108.